

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
1	Xaverius Leonardo	2010-41-072	Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Jak-Sel No. 145/Pdt.P/2009/PA.JS)	1. Bagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam Terhadap perkawinan tanpa akta nikah atau perkawinan yang tidak dicatatkan?  2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah atau yang tidak dicatatkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam?	Umum		Cari Judul Baru	
			Analisis Terhadap Pencabutan Laporan Tindak Pidana Penganiayaan	1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pencabutan laporan?  2. Apakah yang menjadi pertimbangan penyidik sehingga laporan terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut dapat dicabut?	Umum		Cari Judul Baru	
2	Yopi Irawan Arjuna W	2010-41-134	Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Penentuan Hak Perwalian Anak di Bawah Umur sebagai Akibat dari Perceraian (Put. No. 524 K/AG/2012)	1. Bagaimana dampak perceraian terhadap anak yang menjadi korban akibat perceraian anaknya?  2. Bagaimana praktek pelaksanaan penentuan perwalian anak di bawah umur akibat dari perceraian orang tua ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Kompilasi Hukum Islam, dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?				
			Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen sebagai Pasien Jasa Pelayanan Medis (Put. No. 822 K/PID/SUS/2010)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan oleh jasa pelayanan medis ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit?  2. Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan oleh pasien atas kerugian yang dialami sebagai konsumen jasa pelayanan medis?	v		Agung Nugroho	
3	Dio Tatagama	2010-41-075	Penegakan Hukum pada Sekolah Kedinasan (Studi Kasus IPDN Jatinangor)	1. Mengapa penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimanamestinya di IPDN? 2. Bagaimana cara melaksanakan penegakkan hukum di sekolah kedinasan?				
			Pertanggungjawaban Pidana Pilot (Kapten Terbang) Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara	1. perbuatan-perbuatan apakah yang termasuk dalam lingkup tindak pidana di bidang penerbangan menurut UU No 1 Tahun 2009? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pilot dalam kecelakaan pesawat udara ditinjau dari UU No 1 Tahun 2009?				
			Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan	1. Bagaimanakah bentuk-bentuk patroli yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu usaha dalam penanggulangan tindak kejahatan? 2. Sejauh manakah peranan dan tanggungjawab POLRI dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan?	V		Judul Dispecificikasi	Nugraha

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
			Suatu Tindak Kejahatan	3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI dalam melakukan fungsi patroli di masyarakat?				
4	Najiullah	2010-41-128	Kewajiban Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006	1. Apa hambatan-hambatan yang dialami penduduk dalam memenuhi kewajiban pendaftaran Kartu Tanda Penduduk sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006? 2. Bagaimana penerapan sanksi di dalam praktiknya apabila ada penduduk Indonesia yang tidak memenuhi pendaftaran Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006?				
			Tinjauan Yuridis Kriminologi Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran	1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir di DKI Jakarta? 2. Bagaimana efektifitas peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran?	V		Harus Ada Kasus	Nugraha
5	Riska Komara	2009-41-174	Pelaksanaan Pembagian Hukum Kewarisan Masyarakat Hukum Kampung Naga di Pandang dari Hukum Islam	1. Bagaimana pelaksanaan hukum warisan di masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya? 2. Bagaimana pandangan dari hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian hukum kewarisan dalam masyarakat adat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya?	V			Tomy Priananto
			Penyelesaian Sewa Menyewa Tanah dengan Cara Mediasi di Pengadilan (Put. Pengd. Nomor 179/Pdt.G/2011/PN.TNG)	1. Bagaimana mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan"? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa sewa menyewa tanah dengan cara mediasi di pengadilan?	V			Agung Nugroho
7	Nurul Arifiany	2010-41-061	Analisa Yuridis Terhadap Lemahnya Sistem Pemungutan Pajak di Indonesi ditinjau dari Undang-undang No. 28 Th. 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1. Bagaimana penerapan sistem self assesment ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? 2. Apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku?	V			Zulfikri Aboebakar
				1. apakah hakim pengadilan negeri Tangerang dalam putusan No. telah menerapkan hukum dengan benar?				

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
			Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Put. Nomor 127/PID.B/2012/PN.TNG)	2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan dalam hukum positif di Indonesia?				
8	Doan Abisier D. Sinaga	2010-41-108	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Narkotika Menurut Aspek Kriminologi (Studi Kasus Put. Nomor 2510 K/PID.SUS/2011)	1. Apa pandangan secara kriminologi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) narkotika? 2. Bagaimana pemberlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika? 1. bagaimana transparansi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah?	V			Ketut Gede Wijaya
			Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	2. Bagaimana pertanggungjawaban aparaturnegara apabila terjadi tindakan penyelewengan barang dan jasa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?	V			
9	Sri Novalia	2009-41-189	Keabsahan Putusan Hakim Terhadap Perceraian (Studi Kasus Put. Nomor 1763/Pdt.G/2013/PA.TGRS)	1. Apa dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 1763/Pdt.G/2013/PA.TGRS tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? 2. Apa dasar putusan perkawinan tersebut sudah berdasarkan hukum Islam, dimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 131 ayat (4): "Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh, sementara sampai hari ini suami Afriansyah tidak pernah diperintahkan hakim untuk membacakan ikrar talak di hadapan istri dan kuasa hukumnya?			Terlalu Umum	
10	Devi Erlia Susanty	2010-41-084	Analisis Yuridis Tindak Pidana <i>Insider Trading</i> di Bidang Pasar Modal sebagai <i>Predicate Crime on Money Laundering</i>	1. Bagaimanakah hambatan dalam pembuktian tindak pidana <i>Insider Trading</i> di bidang pasar modal sebagai <i>Predicate Crime on Money Laundering</i> ? 2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana <i>Insider Trading</i> di bidang pasar modal melalui penegakan hukum <i>Money Laundering</i> ?	V		Lampirkan Kasus	Zulfikri Aboebakar
			Analisis Yuridis Terhadap Perusahaan yang Menginstruksikan Pekerja Membawa Peralatan Kerja Milik Pribadi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13	1. bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam praktik penerapan peraturan pekerja/buruh membawa peralatan kerja milik pribadi untuk dapat menunjang pekerjaan pekerja/buruh pada perusahaan?				

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
			Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada PT. Citra Tirta Mulia Finance, Cabang Tangerang)	2. bagaimanakah peran pemerintah dalam menerapkan sanksi hukum kepada perusahaan yang menginstruksikan pekerja/buruh yang membawa peralatan milik pribadi tanpa adanya jaminan perlindungan asset pribadi pekerja/buruh yang digunakan untuk menunjang pekerjaan pekerja/buruh tersebut?				
11	oni Suhardiyansy	2010-41-191	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur Ditinjau Dari Sisi Kriminologi dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 799/PID.B/2013/PN.BB)	1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perkara pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh anak sesuai putusan No. 799/PID.B/2013/PN.BB? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai putusan No. 799/PID.B/2013/PN.BB? 3. Adakah teori-teori dalam kriminologi yang menjelaskan tentang penyebab perilaku anak melakukan tindak pidana pembunuhan?			Sudah ada	
12	Cahyo Nur Indra Guna	2009-41-123	Kajian Yuridis Penjatuhan Hukuman Dikembalikan Kepada Orang Tua Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Putusan Nomor	1. Melalui tulisan ini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan mengetahui cara-cara pencegahan agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba mengenai putusan PN 1037/PID.B/2010/PN.JKT.TIM?				
			Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Dalam Perkara Pidana Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 1506/PID.B/2013/PN.TNG)	1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP? 2. Bagaimanakah pandangan pasal 303 ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP mengenai putusan PN Tangerang No. 1506/PID.B/2013/PN.TNG tentang perjudian?			sudah ada	
			Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Kendaraan Ditinjau dari Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 1239/PID.B/2013/PN.TNG)	1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan menurut pasal 378 dan pasal 372 KUHP? 2. Bagaimanakah pandangan KUHP mengenai putusan PN Tangerang No. 1239/PID.B/2013/PN.TNG tentang penipuan dan atau penggelapan?			umum	
13	Ramandha Wahyuaksara	2010-41-016	Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus di	1. Bagaimana implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya non penal Badan Narkotika Nasional?			pilih kasus tertentu	

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
			Narkotika Nasional (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta)	2. Bagaimana mekanisme Badan Narkotika Nasional dalam penanganan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika?				
14	Tysna Novianty	2010-41-021	Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Psikotropika di Wilayah Hukum Polsekta Ciledug	1. Bagaimanakah penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan remaja di wilayah hukum Polsekta Ciledug? 2. Bagaimanakah cara penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan remaja di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Ciledug?			umum	
15	Benny Suratno	2009-41-186	Penyalahgunaan Kadar Zat Pewarna dan Zat Kimia Formalin Dalam Memproduksi Tahu Dilihat dari Segi Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap produsen tahu dilihat dari segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21? 2. Bagaimana dampak dari penggunaan zat pewarna dan zat kimia formalin terhadap konsumen dilihat dari segi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8? 3. Bagaimana penerapan sanksi pidana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 55b tentang pangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan Pasal 21 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 7 dan 8?	V		Permasalahan dibuat 2 point	Ade hari siswanto
			Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Kadar Zat Kimia Pada Produksi Tahu Dilihat dari Segi Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap produsen tahu dilihat dari segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21? 2. Bagaimana dampak dari penggunaan zat pewarna dan zat kimia formalin terhadap konsumen dilihat dari segi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8? 3. Bagaimana penerapan sanksi pidana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 55b tentang pangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan Pasal 21 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 7 dan 8?				
			Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Tahu Dalam Penggunaan Kadar Zat Pewarna dan Zat Kimia Formalin dari Segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 21 tentang Kesehatan	1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap produsen tahu dilihat dari segi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21? 2. Bagaimana dampak dari penggunaan zat pewarna dan zat kimia formalin terhadap konsumen dilihat dari segi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 dan Pasal 8? 3. Bagaimana penerapan sanksi pidana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 55b tentang pangan jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Kesehatan Pasal 21 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen pasal 7 dan 8?				
			Penggunaan Barang Bukti Dalam	1. Apa permasalahan yang timbul dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana narkotika yang diatur dalam pasal 111 dan pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?	Umum		Cari Judul Baru	

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
16	Rifki Ariwiguna	2010-41-074	Penggunaan Barang Bukti Dalam Menentukan Kualifikasi Pengedar atau Pemakai Pada Tindak Pidana Narkotika	2. Bagaimana keterkaitan antara alat bukti, barang bukti, dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam pasal 111 dan pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?				
			Tinjauan Yuridis Terhadap kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM	1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari sisi hukum pidana atau dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana pula kekerasan dalam rumah tangga tersebut dalam perspektif hak asasi manusia? 3. bagaimanakah peranan aparat penegak hukum dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga ?	UMUM		Cari Judul Baru	
17	Minda Poppy Anggreini	2010-41-101	Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor 48-K/PM-11-08/AD/II/2011)	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Anggota TNI dalam Putusan Pengadilan Militer 11-08 Jakarta Nomor 48-K/PM 11-08/AD/II/2011? 2. Bagaimana pengaturan tentang desersi ditinjau dari pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer?	V			K.G. Wijaya
			Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Studi Kasus: Etnis Rohingya di Myanmar)	1. Bagaimana perlindungan terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan? 2. Bagaimana kedudukan orang-orang Rohingya yang keluar dari negara asal untuk mencari perlindungan?				
			Pencabutan Hak Atas Tanah Terlantar Ditinjau Dari Hukum Agraria	1. Sejauh mana pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum? 2. Bagaimana pelaksanaan pembebasan hak atas tanah dapat dilakukan?				
			Tinjauan Yuridis Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pengusahaan Bandar Udara di Indonesia	1. Apakah yang dimaksud dengan pengusaha Bandar Udara di Indonesia? 2. Bagaimanakah bentuk pengaturan dan kerjasama pemerintah swasta dalam pengusaha bandar udara di Indonesia?			Cari Judul Baru	

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
19	Luqman Darwis	2010-41-165	Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 179 C/PK/PJK/2007 tentang Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No. Putusan: 10293/PP/M.VIII/19/2007, tanggal 29 Maret 2007 tentang Pokok Sengketa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM) Nomor: S-000224/AUDKAN/WBC.04/KP.02/2007	<p>1. Mengapa Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No. Putusan: 10293/PP/M.VIII/19/2007, tanggal 29 Maret 2007 ditolak?</p> <p>2. Apakah jaminan tertulis dapat digunakan dalam pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Banding Pengadilan Pajak?</p>	Sudah Ada			

20	Riyandi Binsar Halomoan	2010-41-079	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan di Jalan Raya, Tinjauan Yuridis UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>1. Apa unsur-unsur kelalaian pengemudi yang bisa dipidana?</p> <p>2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengemudi kendaraan karena kelalaiannya dalam kecelakaan lalu lintas?</p>	Sudah Ada			
21	Rina Evita Royhana	2010-41-179	Urgensi Keberadaan Undang-undang Ritel di Indonesia, Berkaca Pada Kasus PT. Carrefour Indonesia Melawan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	<p>1. Bagaimana kasus antara PT. Carrefour Indonesia melawan Komite Pengawas Persaingan Usaha dapat terjadi?</p> <p>2. Kewenangan Komite Pengawas Persaingan Usaha menurut UU No. 5 Tahun 1999?</p> <p>3. Seberapa penting keberadaan UU Ritel dalam melindungi pelaku usaha ritel kecil dan demi mendukung perekonomian Indonesia?</p>	V		Judl Direvis	I Gede Hartadi
22	Edison Ramli	2010-41-166	Perkawinan Sesuku Dalam Hukum Adat Sungai Asam Padang-Pariaman	<p>1. Bagaimanakah konsep perkawinan dalam Hukum Adat Padang-Pariaman?</p> <p>2. Bagaimana peran Ketua Pemuka dalam hal mengatasi perkawinan sesuku?</p> <p>3. Bagaimana sanksi yang timbul dalam hal terjadinya perkawinan dalam satu suku yang sama?</p>	Sudah Pernah			

NO	NAMA	NIM	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	ORISINALITAS	KELAYAKAN	KETERANGAN	Dosen Pembimbing
23	Suhandy	2009-41-165	Analisis Terhadap Sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Ditinjau dari Pasal 54 Ayat (2) dan Pasal 56 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1. Bagaimana sifat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika ditinjau dari Pasal 54 Ayat (2) dan Pasal 56 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?	Judul Tidak Jelas			
			Analisis Terhadap Sifat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Ditinjau dari Pasal 54 Ayat (2) dan Pasal 56 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	2. Bagaimana proses tatacara permohonan eksekusi terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?				

24	Lilis Rusmaya	2010-41-110	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan No. 671/Pid.B/2012/PN.JKT.PST)	1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan?	V			K.G. Wijaya
			Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan No. 671/Pid.B/2012/PN.JKT.PST)	2. Bagaimana analisa hukum pidana terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 671/Pid.B/2012/PN.JKT.PST dalam masalah tindak pidana pemalsuan surat?				
25	Katlin Carolina	2010-41-096	Pemenuhan Kebutuhan Biologis (Seksual) Terhadap Narapidana dalam Lembaga Perasyarakatan Pria Kelas 1 Tangerang	1. Bagaimanakah cara narapidana memenuhi atau mendapatkan kebutuhan seksual secara wajar/normal selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang?	V		Metpen Empiris	K.G. Wijaya
			Pemenuhan Kebutuhan Biologis (Seksual) Terhadap Narapidana dalam Lembaga Perasyarakatan Pria Kelas 1 Tangerang	2. Kondisi apakah yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang?				
			Pemenuhan Hak Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pria Kelas 1 Tangerang	1. Bagaimana upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang?				
			Pemenuhan Hak Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pria Kelas 1 Tangerang	2. Faktor Penghambat internal dan eksternal apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang?				